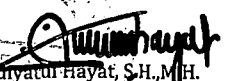

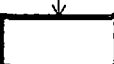
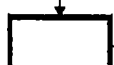
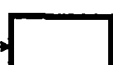




**INSPEKTORAT
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nomor SOP	: 700/ 31 /SOP/Insp-2022
Tanggal Pembuatan	: 05 Oktober 2022
Tanggal Revisi	: 10 Oktober 2022 --
Tanggal Efektif	: --
Disahkan oleh	Inspektur,  Ruddyatur Hayat, S.H., M.H. Pembina Utama Muda/W.c NIP. 19690620 199308 2'001
Nama SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharma Raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat	1. Memiliki pengetahuan terhadap Per- UU-an dibidang standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan berpenampilan rapih dan berjiwa melayani
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen informasi publik di setiap bagian 2. Komputer 3. Softcopy dokumen informasi publik 4. Jaringan internet 5. Alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila penetapan tersebut menjadi terhambat	1. Dokumen informasi publik yang dikecualikan

FLOWCHART SOP UJI PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID Pembantu	Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan Inspektorat Daerah					Data terupdate dan telah terverifikasi	60 Menit	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy informasi publik yang dikecualikan kepada PPID					Soft File	60 Menit	Soft File	
3	Menerima dan menyimpan soft copy informasi publik dalam storage internal PPID					Dokumen	60 Menit	Dokumen	

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Inspektorat Kabupaten Solok Selatan :

Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi yang dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
Arsip Dinamis Yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Untuk Menjamin Rekaman Kegiatan dan Peristiwa	Terbatas Sampai Setelah Selesai Diaudit	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pengadaan Langsung	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat	Terbatas Sampai Dengan Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai	Muncul Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Dapat Menjaga Obyektifitas Penilaian

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit 	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Jika dikuasai Oleh Orang - Orang Yang Tidak Bertanggungjawab Dapat Disalahgunakan	Terbatas Sampai Dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Tertentu	Membantu Badan Publik Dalam Menyusun Kebijakan
Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang 	LHP Jika Dikuasai Oleh Orang / Pihak Yang Tidak Terkait Berpotensi Terjadi Penyalahgunaan LHP	Tak Terbatas	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak - Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Membantu Badan Publik Dalam Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit				
--	---	--	--	--	--